



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARNO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **50853**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.054.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/45 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/120 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 424.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 575.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SWIFT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA (ROW LACQUER) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA GIANT PROPEL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
6. LAINNYA, S WORK SL 6 SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



7. MOTOR, YAMAHA S MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	269.380.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	210.000.000
Sub Total	Rp.	2.168.380.500
III. HUTANG	Rp.	152.319.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.016.061.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.